

Kerja Sama Usaha dan Kemitraan BUMDes

Kode: SOP/BUMDES/12 · Sumber: SOP-12_Kerja-Sama-Usaha-dan-Kemitraan-BUMDes.docx · Cetak: 2026-09-08 13:06

SOP Kerja Sama Usaha dan Kemitraan BUMDes

Tabel

No	Kolom 1
1	DOKUMEN SOP BUMDes

SOP Kerja Sama Usaha dan Kemitraan BUMDes

Prosedur operasional standar peninjauan kerja sama, due diligence mitra, negosiasi, review klausul, penandatanganan, monitoring, dan evaluasi kemitraan.

Tabel

No	Kode Dokumen	SOP/BUMDES/12
1	Klasifikasi	Standar Operasional Prosedur
2	Status	Template siap pakai
3	Catatan	Dapat disesuaikan dengan Perdes, keputusan desa, dan struktur organisasi BUMDes setempat.

Tabel

No	Unit Penyusun	BUMDes / Pemerintah Desa	Nomor Revisi	
1	Tanggal Berlaku		Halaman	Sesuai file
2	Disahkan oleh		Dikendalikan oleh	
3	Distribusi	Pengawas, Pelaksana Operasional, Unit Usaha	Klasifikasi	Internal Terkendali

A. Informasi Dokumen

B. Tujuan

Menetapkan tata cara kerja sama usaha dan kemitraan BUMDes agar setiap hubungan bisnis dibangun secara selektif, adil, tertulis, dan dapat dipantau hasil maupun risikonya.

C. Ruang Lingkup

Berlaku untuk seluruh rencana kerja sama BUMDes dengan pemerintah, swasta, koperasi, komunitas, lembaga keuangan, distributor, pemasok, pembeli tetap, investor, maupun pihak lain yang memberi dampak terhadap usaha BUMDes.

D. Dasar Hukum dan Acuan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang mengatur pendirian, AD/ART, organisasi dan pegawai, rencana program kerja, kepemilikan, modal, aset dan pinjaman, unit usaha, pengadaan barang/jasa, kerja sama, pertanggungjawaban, pembagian hasil usaha, kerugian, penghentian kegiatan usaha, serta pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang pendaftaran, pendataan dan pemeringkatan, pembinaan dan pengembangan, dan pengadaan barang dan/atau jasa BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Peraturan desa, keputusan kepala desa, keputusan penasihat/pengawas, serta kebijakan internal BUMDes yang relevan.

E. Definisi Singkat

Kerja sama usaha adalah hubungan antara BUMDes dengan pihak lain untuk mencapai tujuan usaha tertentu berdasarkan kesepakatan tertulis.

Due diligence adalah pemeriksaan awal atas profil, legalitas, kapasitas, rekam jejak, dan risiko mitra sebelum keputusan kerja sama dibuat.

Naskah kerja sama adalah dokumen tertulis seperti MoU, PKS, kontrak, atau perjanjian lain yang mengikat para pihak.

Monitoring kerja sama adalah pemantauan pelaksanaan kewajiban, manfaat, target, dan potensi sengketa selama masa perjanjian.

F. Pihak Terkait dan Tanggung Jawab

No	Pihak	Tanggung Jawab Utama
1	Penasihat	Memberi arah strategis atas kerja sama yang berdampak besar pada aset, reputasi, atau keberlanjutan usaha desa.

No	Pihak	Tanggung Jawab Utama
2	Pengawas	Menelaah kepatuhan dan risiko serta memberi masukan atas rancangan kerja sama yang penting.
3	Pelaksana Operasional	Memimpin proses penjajakan, menyetujui kelayakan mitra, dan memastikan kerja sama sesuai tujuan BUMDes.
4	Tim Negosiasi / Penanggung Jawab	Mengumpulkan data mitra, menyiapkan bahan negosiasi, dan menyusun draft butir-butir kesepakatan.
5	Admin/Keuangan	Mengecek implikasi anggaran, skema pembayaran, pembagian hasil, dan kewajiban administrasi.
6	Pendamping Hukum/Reviewer Internal	Menelaah klausul utama agar tidak merugikan BUMDes dan sesuai ketentuan.
7	Unit Pelaksana	Menjalankan isi perjanjian dan melaporkan capaian maupun hambatan.

G. Prosedur Kerja

No	No	Tahap	Uraian Kegiatan	PIC	Output	Batas Waktu
1	1	Identifikasi peluang	Peluang kerja sama diusulkan berdasarkan kebutuhan usaha, perluasan pasar, efisiensi pasokan, akses modal, atau pengembangan layanan.	Pelaksana Operasional	Usulan kerja sama	Saat peluang muncul

No	No	Tahap	Uraian Kegiatan	PIC	Output	Batas Waktu
2	2	Pengumpulan data mitra	Dikumpulkan informasi profil, legalitas, kapasitas operasional, reputasi, pengalaman, dan referensi mitra.	Tim Negosiasi	Profil mitra	1-3 hari
3	3	Due diligence awal	Dilakukan penilaian manfaat, risiko, potensi konflik, skema bisnis, dan kecocokan dengan tujuan BUMDes.	Tim Negosiasi	Lembar due diligence	1-3 hari
4	4	Negosiasi pokok kerja sama	Para pihak membahas ruang lingkup, hak dan kewajiban, pembagian hasil, target, jangka waktu, sanksi, dan mekanisme penyelesaian masalah.	Pelaksana/Tim	Notulen negosiasi	Sesuai agenda

No	No	Tahap	Uraian Kegiatan	PIC	Output	Batas Waktu
5	5	Review draft perjanjian	Draft diperiksa dari sisi bisnis, administrasi, dan hukum sebelum disetujui untuk ditandatangani.	Reviewer Internal	Draft final	Maks. 2 hari
6	6	Persetujuan dan penandatanganan	Pejabat berwenang menyetujui dan menandatangani dokumen kerja sama sesuai ketentuan internal.	Pejabat Berwenang	Perjanjian ditandatangani	1 hari
7	7	Pelaksanaan dan monitoring	Unit pelaksana menjalankan kerja sama dan memantau target, termin, kewajiban pihak, serta potensi deviasi.	Unit Pelaksana	Laporan monitoring	Berkala

No	No	Tahap	Uraian Kegiatan	PIC	Output	Batas Waktu
8	8	Evaluasi dan tindak lanjut	Kerja sama dievaluasi untuk dipertahankan, diperbaiki, diperpanjang, atau dihentikan sesuai hasil dan risiko.	Pengawas/Pelaksana	Berita acara evaluasi	Minimal per semester

H. Checklist Implementasi

No	No	Butir Pengendalian	Status	Catatan
1	1	Ada usulan kerja sama yang menjelaskan tujuan dan manfaat bisnis.	Sesuai Belum	
2	2	Legalitas dan profil mitra diverifikasi sebelum penandatanganan.	Sesuai Belum	
3	3	Hasil due diligence awal didokumentasikan.	Sesuai Belum	
4	4	Butir pokok kerja sama dinegosiasikan dan dituangkan tertulis.	Sesuai Belum	
5	5	Draft perjanjian direview sebelum ditandatangani.	Sesuai Belum	
6	6	Ada penanggung jawab monitoring selama perjanjian berjalan.	Sesuai Belum	

No	No	Butir Pengendalian	Status	Catatan
7	7	Hasil evaluasi kerja sama dicatat sebagai dasar perpanjangan/perubahan/penghentian.	Sesuai Belum	

I. Lampiran Formulir Siap Pakai

Lampiran 1. Form Due Diligence Mitra

No	Nama Mitra	Kolom 2
1	Bidang Usaha	
2	Alamat / Kontak	
3	Legalitas Utama	
4	Rekam Jejak / Referensi	
5	Manfaat Bagi BUMDes	
6	Risiko Utama	
7	Kesimpulan	Layak Perlu Perbaikan Tidak Layak

Lampiran 2. Ringkasan Pokok Kerja Sama

No	Tujuan Kerja Sama	Kolom 2
1	Ruang Lingkup	
2	Hak dan Kewajiban BUMDes	
3	Hak dan Kewajiban Mitra	
4	Skema Pembayaran / Bagi Hasil	
5	Jangka Waktu	
6	Sanksi / Penyelesaian Sengketa	
7	Penanggung Jawab	

Lampiran 3. Form Monitoring Kemitraan

No	Nama Mitra / Nomor Perjanjian	Kolom 2
1	Periode Monitoring	
2	Target / KPI Utama	
3	Realisasi	
4	Kendala / Risiko	
5	Tindakan Koreksi	
6	Status	Lanjut Revisi Hentikan
7	Evaluator	

9. Pengesahan

No	Disiapkan oleh	Diperiksa oleh	Disahkan oleh
1	Nama:Jabatan:Tanggal:Tanda Tangan:	Nama:Jabatan:Tanggal:Tanda Tangan:	Nama:Jabatan:Tanggal:Tanda Tangan: